

**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2003-2006

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :

P. Heru Prasetyo

NIM: 032114029

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2008**

SKRIPSI
ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006

Oleh:

P. Heru Prasetyo

NIM: 032114029

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I



A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A.

Tanggal 9 November 2007

Pembimbing II



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanggal 11 November 2007

SKRIPSI

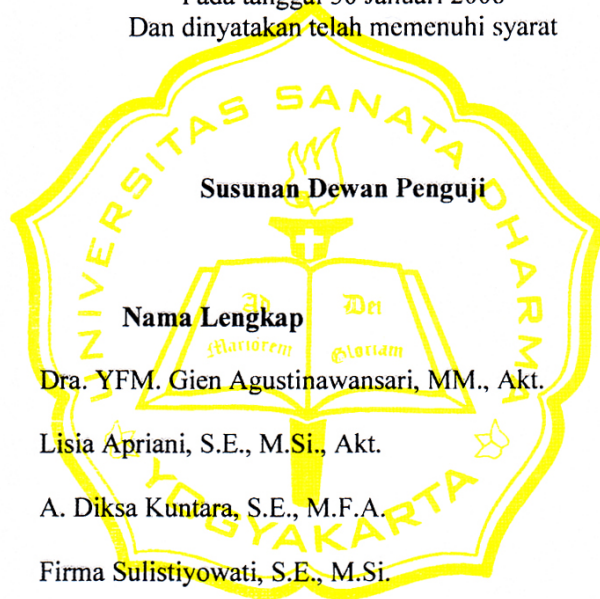
**ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

P. Heru Prasetyo

NIM: 032114029

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Januari 2008
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat



Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt.
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si., Akt.

Tanda Tangan

[Handwritten signatures of the five members of the examination board]

Yogyakarta, 31 Januari 2008

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

Dekan,



[Handwritten signature of the Dean]
Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

NOTA DAN PERSEORANGAN

Kecemasan

Orang sering cemas mengambil langkah yang terlalu kecil.
Kecemasan mereka adalah karena itu tidak cukup bermakna atau nyata.
Mereka juga cemas bila orang lain menertawakan mereka atau menganggap mereka lemah.
Banyak orang begitu takut mengambil langkah yang terlalu kecil sampai akhirnya tidak mengerjakan apa-apa.

(Richard Carlson)

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Tuhanku Yesus Kristus

Bunda Maria Ter cinta

Santo Petrus Pelindungku

Bapak dan Ibuku Ter cinta

Kakakku Indra dan mbak Justin, mbak Ambar dan mas Lukas, mas sigit dan mbak Etna, mas Ivan, mbak Dewi, kembaranku Heri, adek Estu, Gerald, Ivan, Feliz, Puan dan Thomas

Terima kasih banyak atas doa, dukungan, dan cinta yang sudah tercurah untuk menyelesaikan skripsiku...God

Bless You All....



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **Analisis Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Januari 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atas sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rbgkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berrarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, November 2007
Yang membuat pernyataan,

P. Heru Prasetyo

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : P. Heru Prasetyo

Nomor Mahasiswa : 032114029

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 4 Februari 2008

Yang menyatakan



(P. Heru Prasetyo)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan penyertaannya dari awal hingga terselesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis dengan kerendahan hati dan dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
2. Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Ibu Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ibu Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan untuk memberikan bimbingan, masukan, semangat dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
7. Bapak Agus Budiono, selaku Kepala Dinas Perhubungan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Drs. Pranyoto, selaku Kepala Dinas UPT Pengelolaan Perparkiran yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan berkenan meluangkan waktu untuk wawancara dan mencari data.
9. Bapak Lukman, Ibu Risma dan mas Agus, yang telah berkenan membantu penulis dalam mencari data.
10. Bapak (W.A. Suyadi) dan Ibu (Isnani Wulandari), kakak (mas Indra, mbak Yustin, mbak Ambar, mas Lukas, mas Sigit, mbak Erna, mas Iwan, mbak Dewi dan adik-adikku (Estu, Gerald, Ivan, Feliz, Puan dan Thomas) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan perhatian serta doa kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Heri kembaranku, yang telah mendukung dan memberikan saran-sarannya selama menyelesaikan skripsi ini.
12. Ana Wulan Ika Astuti, yang telah mendukung dan memberikan kasih sayang, perhatian, bantuan dan doanya selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Anak-anak Akuntansi Angkatan 2003, terutama Akuntansi A terima kasih atas persahabatannya.
14. Teman-teman seperjuanganku Danu dan Galuh, Vero, Toyo, Wiji, Wahyu, Eko, David, Anto, Adi Irawan, Nonok.
15. Teman-teman seperjuangan MPT Pepeng, Fitrah, Olen, Mita, Yuni, Yuliana, Valentina, mbak Rufina.

16. Semua orang yang ada di dekatku, yang sudah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Yogyakarta, November 2007

P. Heru Prasetyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Otonomi Daerah	7
1. Pengertian	7
2. Tujuan Otonomi Daerah	7

3. Sasaran Otonomi Daerah	8
4. Prinsip Otonomi Daerah	8
5. Tolok Ukur Otonomi Daerah	9
6. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah	9
B . Penerimaan Daerah	9
C. Pendapatan Asli Daerah	12
1. Pengertian	12
2. Sumber PAD	12
D. Retribusi Daerah.....	14
1. Pengertian	14
2. Objek Retribusi Daerah	15
3. Subjek Retribusi Daerah	16
4. Ciri-ciri Retribusi Daerah	16
5. Tata Cara Pemungutan	17
6. Jenis Retribsui Daerah	17
E. Retribusi Parkir	20
1. Pengertian	20
2. Objek Retribusi Parkir	20
3. Subjek Retribusi Parkir	21
4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	21
F. Analisis Pertumbuhan	23
G. Efektivitas dan Efisiensi.....	24
1. Efektivitas	24
2. Efisiensi.....	25

H. Analisis Kontribusi	26
I. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Tempat dan Waktu Penelitian	29
C. Subyek dan Obyek Penelitian	29
D. Data yang Dicari	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	35
A. Sejarah Kota Yogyakarta	35
B. Keadaan Geografis	36
1. Batas Wilayah	36
2. Keadaan Alam	37
3. Luas Wilayah	37
4. Iklim	39
C. Keadaan Penduduk	40
D. Sarana dan Prasarana Transportasi	42
E. Proses Pemungutan Retribusi Parkir	42
F. Proses Penerimaan Retribusi Parkir	43
G. Kawasan Parkir di Kota Yogyakarta	44
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Data	46
B. Analisis Pertumbuhan	48

C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi	50
D. Analisis Kontribusi	57
BAB VI PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan Penelitian	61
C. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta.....	32
Tabel 2. Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta.....	33
Tabel 3. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	34
Tabel 4. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta.....	38
Tabel 5. Jumlah Penduduk Tahun 2006 Kota Yogyakarta.....	41
Tabel 6. Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003 – 2006.....	46
Tabel 7. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003 – 2006.....	47
Tabel 8. Biaya pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006.....	47
Tabel 9. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2003 – 2006.....	47
Tabel 10. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006.....	49
Tabel 11. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006.....	52
Tabel 12. Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006.....	56
Tabel 13. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD Tahun 2003 - 2006.....	59

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2003-2006

P. Heru Prasetyo
NIM: 032114029
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2008

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, (2) Efektivitas dan Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, (3) Besar kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan teknik analisis kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 sebesar 41,29%; tahun 2005 sebesar 51,53%; ini berarti pertumbuhannya positif sedangkan pada tahun 2006 pertumbuhannya negatif yaitu hanya (2,72%), (2) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mencapai rata-rata sebesar 85,34% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di kota yogyakarta tidak efektif sedangkan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 30,65% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta efisien, (3) Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,30% pada tahun 2003; 1,58% pada tahun 2004; 2,15% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

ABSTRACT

The Analisis of Parking Restribution's Revenue toward
The Original Region's Income
A Case Study to The Government of Yogyakarta City
Year 2003-2006

P. Heru Prasetyo
Student Number: 032114029
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2008

This research aims to know (1) the development of the parking restribution's revenue from 2003 up to 2006, (2) the effectiviness and efficiency of the parking restribution's revenue from 2003 up to 2006, (3) the amount of the contribution of the parking restribution's revenue toward the original region's income from 2003 up to 2006.

The sort of this research is a case study. The data is taken by doing interview and documentation. The technique of the data analysis are quantitative analysis and qualitative analysis technique.

The data analysis show that (1) the development of the parking restribution's revenue in the Yogyakarta city in 2004 was 41,29%; in 2005 was accounted 51,53%; it means that there was a positive development, meanwhile in 2006 the development was negative that was only (2,72%), (2) the efectiviness of the parking restribution's revenue in the Yogyakarta city from 2003 up to 2006 reached the average of 85,34% pre year. It show that the parking restribution's revenue in the Yogyakarta city was not effective meanwhile the efficiency of the parking restribution's revenue in the Yogyakarta city reached the average of 30,65% pre year. It show that the parking restribution's revenue in the Yogyakarta city was efficient, (3) Contribution of the parking restribution's revenue toward the original region's income in the amount of 1,30% in 2003; 1,58% in 2004; 2,15% in 2005, meanwhile in 2006 there was a lowering from 0,22% to 1,93%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001, maka pembiayaan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya

pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2 tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Salah satu alternatif retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Seiring dengan meningkatnya aktivitas yang terjadi, khususnya aktivitas masyarakat Kota Yogyakarta mengakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir baik di badan jalan atau di luar badan jalan. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang parkir baik bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi dilokasi parkir tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah Kota Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dengan membangun jalan-jalan yang baru atau memperbaiki jalan-jalan yang

telah ada sebelumnya. Usaha tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dari segenap warga masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan di bidang perpajakan, yaitu Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut serta dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir maka secara otomatis akan meningkatkan penerimaan/pemasukan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dari pos penerimaan retribusi parkir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006?
3. Berapa besar kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
3. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh ke dalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini yaitu mengenai otonomi daerah, penerimaan daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, retribusi parkir, analisis pertumbuhan, analisis efektivitas dan efisiensi, analisis kontribusi dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Gambaran Umum Pemerintahan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdiri dari analisis data dan pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I.

BAB VI Penutup

Dalam bab ini penulis menyajikan kesimpulan dari analisis data dan saran dengan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah:

”Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah:

”Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.

3. Sasaran Otonomi Daerah

Sasaran otonomi daerah menurut Maskun (2001: 224) adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

4. Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah

Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab

Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

b. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

5. Tolok Ukur Otonomi Daerah

Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 yang menjadi tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana

kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

6. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 5 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan daerah berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan

kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan bersumber dari:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. penerimaan pinjaman daerah
- c. dana cadangan daerah
- d. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah:

“Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah)”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Samudra (1995: 51) adalah:

“Penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau disajikan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah”.

2. Sumber Pendaptan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Adapun sumber-sumber PAD yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Azhari (1995: 41) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Soetrisno (1993: 139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari: bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam Lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan asset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa oleh daerah.

D. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah adalah:

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Suparmoko (1987: 84), Retribusi adalah:

“Suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut”.

Menurut Munawir (1990: 4), yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah:

“Iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, dipaksakan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa tersebut tidak dikenakan iuran tadi. Jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan langsung dengan jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut”.

Dalam retribusi daerah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan (Samudra, 1995: 51):

- a. adanya pelayanan langsung yang diberikan sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
- b. terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
- c. ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

2. Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa umum

Objek retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Retribusi Jasa usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Subjek Retribusi Daerah

- a. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu

4. Ciri-Ciri Pokok Retribusi Daerah

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut (Siahaan 2005: 7):

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

6. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal

- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - 7) Retribusi Penyedotan Kakus
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - 10) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
 - 11) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek

E. Retribusi Parkir

1. Pengertian

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Sedangkan retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Kota Yogyakarta untuk retribusi parkir di bedakan menjadi 2 yaitu retribusi parkir di tepi jalan umum yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 dan retribusi tempat khusus parkir yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002.

2. Objek Retribusi Parkir

a. Objek Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang menjadi objek retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

b. Objek Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Pasal 3 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang menjadi Objek Retribusi adalah tempat khusus parkir berupa gedung parkir, taman parkir dan atau pelataran serta fasilitas penunjang yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Khusus Parkir, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

3. Subjek Retribusi parkir

Subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir.

4. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima.

- a. Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

Kawasan Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir
Kawasan Khusus	- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 10.000,-
	- Truk Besar	Rp. 8.500,-
	- Bus Besar	Rp. 8.008,-
	- Truk sedang	Rp. 7.000,-
	- Bus sedang	Rp. 6.500,-
	- Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon	Rp. 1.500,-
	- Sepeda Motor	Rp. 500,-
	- Sepeda	Rp. 200,-
Kawasan I	- Truk gandengan, sumbu III atau lebih	Rp. 8.500,-
	- Truk Besar	Rp. 7.000,-
	- Bus Besar	Rp. 6.500,-
	- Truk sedang	Rp. 5.500,-
	- Bus sedang	Rp. 5.000,-
	- Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon	Rp. 1.000,-
	- Sepeda Motor	Rp. 400,-
	- Sepeda	Rp. 100,-

- b. Struktur dan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut:

Tempat Khusus Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir
Kawasan Khusus	Truk gandengan, sumbu III atau lebih.	Rp.10.000,-
	Truk Besar.	Rp. 8.500,-
	Bus Besar.	Rp. 8.000,-
	Truk sedang.	Rp. 7.000,-
	Bus sedang.	Rp. 6.500,-
	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon.	Rp. 1.500,-
	Sepeda Motor.	Rp. 500,-
	Sepeda.	Rp. 200,-
Kawasan I	Truk gandengan, sumbu III atau lebih.	Rp. 8.500,-
	Truk Besar.	Rp. 7.000,-
	Bus Besar.	Rp. 6.500,-
	Truk sedang.	Rp. 5.500,-
	Bus sedang.	Rp. 5.000,-
	Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon.	Rp. 1.000,-
	Sepeda Motor.	Rp. 400,-
	Sepeda.	Rp. 100,-

F. Analisis Pertumbuhan

1. Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus (Halim, 2001: 163):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

G. Efektivitas dan Efisiensi

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2002: 132).

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001: 263), yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasar atas pengertian efektivitas Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2001: 263), maka yang dimaksud dengan efektivitas retribusi parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target retribusi parkir yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135).

2. Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2002: 132).

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2001: 263-264).

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Berdasar pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2001: 263-264), maka yang dimaksud dengan efisiensi retribusi parkir yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik (Halim, 2001:263-264).

H. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

I. Penelitian Terdahulu

Azis (1996) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Di Kotamadya Bandar Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi sumber dan potensi retribusi parkir, sehingga dapat diketahui efisiensi dan efektivitas suatu peningkatan penerimaan retribusi parkir, (2) Menganalisis dan mengkaji sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan retribusi parkir, (3) Menganalisis dan mengkaji pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan (1) Sumber dan potensi retribusi parkir belum digali secara optimal, hal ini dapat dilihat pada persentase realisasi penerimaan retribusi parkir dengan potensi retribusi parkir masih rendah, yaitu rata-rata 30% setiap tahunnya, (2) Sistem perencanaan, pengelolaan dan peran serta manajemen keuangan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan peningkatan penerimaan retribusi parkir, belum dilaksanakan sepenuhnya, (3) Pemanfaatan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang termasuk dalam MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah) belum dilaksanakan sepenuhnya, baik itu dalam sistem pemungutan maupun dalam pelaporan, sehingga kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar.

Hayani (2001) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota

Banjarbaru Kalimantan Selatan”. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang didapat adalah terjadinya peningkatan pemungutan retribusi parkir dari tahun 1999-2001 saat diprosentasikan dengan anggaran yang ada. Dan dari total Pendapatan Asli Daerah retribusi parkir yang terbagi dua yaitu parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir mampu menyumbang 13,025 % pada tahun 1999, di tahun 2000 mampu menyumbang cukup besar yaitu sebesar 22,32 % dan tahun 2001 sebesar 16,28 %. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu saat optimalisasi pemungutan retribusi khususnya parkir dilakukan dengan perbaikan sistem, sarana dan prasarana yang ada maka Kota Banjarbaru dapat dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerahnya.

Sugiarti (2006) melakukan penelitian dengan judul ”Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri”. Menurut Sugiarti, penelitian ini mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang saling berkaitan dan harus dilakukan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, antara lain pemungutan retribusi parkir lebih efektif, peningkatan ketertiban petugas pemungut dan peningkatan pelayanan parkir yang diberikan. Untuk itu diperlukan perbaikan sistem pemungutan retribusi parkir, salah satunya dengan system parkir berlangganan, sehingga tujuan optimalisasi realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Kediri akan dapat tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya terbatas pada objek yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

2. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Januari 2007.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan obyek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang obyek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subyek dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Dinas Pendapatan.

2. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian adalah data Retribusi Parkir dan data Pendapatan Asli Daerah.

D. Data yang Dicari

Data yang diperlukan atau data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Data Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2003 sampai dengan tahun 2006
3. Data realisasi penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2003 sampai dengan tahun 2006
4. Data target penerimaan retribusi parkir Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2003 sampai dengan tahun 2006
5. Data biaya pemungutan retribusi parkir Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2003 sampai dengan tahun 2006

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan :

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara sistematis dengan pihak berwenang untuk mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan.

2. Metode Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip-arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui wawancara.

1. Permasalahan pertama

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

2. Permasalahan kedua

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektivitas dan efisiensi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, dengan menggunakan langkah- langkah :

a. Efektivitas

- 1). Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
- 2). Mengambil data target penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
- 3). Memasukan kedua data tersebut ke dalam rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

- 4). Memasukan hasil perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir ke dalam tabel:

Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target Retribusi Parkir	Tingkat Efektivitas (%)
2003			
2004			
2005			
2006			

Kemampuan memperoleh penerimaan retribusi parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

b. Efisiensi

- 1). Mengambil data biaya pemungutan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
- 2). Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
- 3). Memasukan kedua data tersebut ke dalam rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

- 4). Memasukkan hasil penghitungan ke dalam tabel:

Tabel 2. Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta

Tahun	Biaya Pemungutan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Tingkat Efisiensi (%)
2003			
2004			
2005			
2006			

Penerimaan retribusi parkir dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% (Semakin kecil rasio ini maka semakin baik).

3. Permasalahan ketiga

Untuk menjawab permasalahan ketiga digunakan analisis kontribusi. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengambil data realisasi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
- b. Mengambil data realisasi penerimaan PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006.
- c. Memasukkan kedua data tersebut ke dalam rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2003			
2004			
2005			
2006			

Jika penerimaan retribusi parkir selalu meningkat tiap tahunnya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika pertumbuhan penerimaan retribusi parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus sebagai Kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul. Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi DIY di mana terletak Kraton sebagai pusat dari segala kegiatan masyarakat Yogyakarta.

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Sesudah perjanjian Giyanti (Palihan Nagari) pada tahun 1775, Mataram dibagi menjadi dua kerajaan, Kasultanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Sunan Pakubuwono III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sesudah perjanjian Giyanti, pangeran Mangkubumi - saudara laki-laki Susunahan Pakubuwono II - dinobatkan menjadi raja Ngayogyakarta Hadiningrat dengan nama Sultan Hamengku Buwono I. Beliau adalah yang mengawali garis keturunan para Sultan yang sampai saat ini masih tinggal di Kraton dan berperan penting dalam budaya masyarakat Jawa. Kerajaan kedua disebut dengan Yogyakarta, sekarang lebih dikenal dengan Yogya.

Pada tahun 1813, di bawah kekuasaan Inggris, untuk ketiga kalinya perpecahan terjadi di kerajaan Mataram. Pangeran Noto Kusumo, anak laki-laki

Hamengku Buwono I, dinobatkan menjadi Pangeran Paku Alam I dan tinggal terpisah dari Kasultanan Yogyakarta.

Pada saat Republik Indonesia didirikan tanggal 17 Agustus 1945, sesudah proklamasi kemerdekaan, Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan) dan Pakualaman (Kadipaten) bergabung menjadi satu propinsi dan menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai gubernur dan Sri Paku Alam VIII sebagai wakil gubernur. Sejak saat itu dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta dan berstatus propinsi pada tahun 1950 sebagai penghargaan karena berperan penting dalam berperang demi kemerdekaan.

B. Keadaan Geografis

1. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kabupaten Sleman
2. Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
3. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
4. Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49' 26''$ sampai $7^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

2. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan \pm 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

1. Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong
2. Bagian tengah adalah Sungai Code
3. Sebelah barat adalah Sungai Winongo

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 3.250 Ha atau $32,50 \text{ Km}^2$ (1,02% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,50 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,60 Km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 614 Rukun Warga (RW) dan 2.523 Rukun Tetangga (RT).

Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,27 Ha dan bagian kecil berupa lahan kosong seluas 20,20 Ha.. Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luas yaitu 812,00 Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman dengan luas 63,00 Ha (1,94%).

Adapun luas masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 4. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2006

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas Km ²	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Mantrijeron	1.Gedungkiwo	0.90	18	86
		2.Suryodiningratan	0.85	17	69
		3.Mantrijeron	0.86	20	75
			2.61	55	230
2.	Kraton	1.Patehan	0.40	10	44
		2.Panembahan	0.66	18	78
		3.Kadipaten	0.34	15	53
			1.40	43	175
3.	Mergangsan	1.Brontokusuman	0.93	23	83
		2.Keprakan	0.53	13	57
		3.Wirogunan	0.85	24	76
			2.31	60	216
4.	Umbulharjo	1.Giwangan	1.26	13	42
		2.Sorosutan	1.68	16	63
		3.Pandeyan	1.38	12	46
		4.Warungboto	0.83	9	38
		5.Tahunan	0.78	11	48
		6.Muja Muju	1.53	12	55
		7.Semaki	0.66	10	34
			8.12	83	326
5.	Kotagede	1.Prenggan	0.99	13	57
		2.Purbayan	0.83	14	58
		3.Rejowinangun	1.25	13	49
			3.07	40	164
6.	Gondokusuman	1.Bajiro	1.06	21	88
		2.Demangan	0.74	12	44
		3.Klitren	0.68	16	63
		4.Kotabaru	0.71	4	21
		5.Terban	0.80	12	59
			3.99	65	275
7.	Pakualaman	1.Purwokinanti	0.30	10	47
		2.Gunungketur	0.33	9	36
			0.63	19	83
8.	Gondomanan	1.Prawirodirjan	0.67	18	61

		2.Ngupasan	0.45 1.12	13 31	49 110
9.	Danurejan	1.Suryatmajan 2.Tegalpanggung 3.Bausasran	0.28 0.35 0.47 1.10	15 16 12 43	45 66 49 160
10.	Ngampilan	1.Notoprajan 2.Ngampilan	0.37 0.45 0.82	8 13 21	50 70 120
11.	Wirobrajan	1.Patangpuluhan 2.Wirobrajan 3.Pakuncen	0.44 0.67 0.65 1.76	10 12 12 34	51 58 56 165
12.	Gedungtengen	1.Pringgokusuman 2.Sosromenduran	0.46 0.50 0.96	23 14 37	89 55 144
13.	Jetis	1.Bumijo 2.Gowongan 3.Cokrodiningratan	0.58 0.46 0.66 1.70	13 13 11 37	55 52 60 167
14.	Tegqalrejo	1.Tegalrejo 2.Bener 3.Kricak 4.Karangwaru	0.82 0.57 0.82 0.57 2.91	12 7 13 14 46	46 25 61 56 188
	Jumlah	45	32,50	614	2.523

4. Iklim

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah $\pm 90^\circ - 140^\circ$ dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan registrasi penduduk tahun 2006, jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2006 adalah 523.191 orang, terdiri dari 268.780 orang laki-laki dan 254.411 orang perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 51,37% lakilaki dan 48,63% perempuan.

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal tersebut terlihat dengan nilai sex ratio yang lebih tinggi dari 100 yaitu sebesar 105,63%. Apabila dilihat selama kurun waktu tahun 2001 sampai 2006, pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta nilainya selalu positif walaupun kenaikannya tidak banyak. Dari tahun 2005 dan 2006 pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta secara berturut-turut adalah 0,97% dan 0,80%.

Apabila dilihat dari banyaknya penduduk per kecamatan, pada tahun 2006 Kecamatan Gondokusuman merupakan kecamatan yang penduduknya paling banyak di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak 75.803 orang dengan proporsi 14,48%, sedangkan diposisi kedua yaitu Kecamatan Umbulharjo sebanyak 74.347 orang dengan proporsi 14,21%. Kecamatan yang penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Pakualaman hanya sebanyak 15.118 orang dengan proporsi sebesar 2,88 %.

Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi adalah Kecamatan Ngampilan yaitu sebesar 29.074 orang/Km². Kecamatan ini mempunyai luas wilayah sebesar 0,82 Km² dan berpenduduk sebanyak 23.841 orang. Sedangkan

kecamatan yang kepadatan penduduknya paling kecil adalah Kecamatan Umbulharjo yaitu sebanyak 9.156 Orang/Km². Meskipun kecamatan ini merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak di urutan kedua, akan tetapi karena wilayahnya luas yaitu sebesar 8,12 Km² maka kepadatan penduduknya kecil. Berbeda halnya dengan Kecamatan Ngampilan, meskipun jumlah penduduknya relatif cukup besar akan tetapi karena luas wilayahnya sempit maka mengakibatkan kepadatan penduduknya besar.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Hasil Registrasi Tahun 2006
Kota Yogyakarta

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
			L	P
1	Mantrijeron	41.124	20.775	20.349
2	Kraton	29.952	14.907	15.045
3	Mergangsan	42.811	22.515	20.296
4	Umbulharjo	74.347	38.491	35.856
5	Kotagede	32.269	16.198	16.071
6	Gondokusuman	75.803	40.381	35.422
7	Pakualaman	15.118	7.388	7.730
8	Gondomanan	17.958	8.857	9.101
9	Danurejan	31.707	16.884	14.823
10	Ngampilan	23.841	11.983	11.858
11	Wirobrajan	31.397	15878	15.515
12	Gedungtengen	26.791	13.401	13.390
13	Jetis	38.213	19.779	18.434
14	Tegqalrejo	41.860	21.343	20.517
	Jumlah	523.191	268.780	254.411

D. Sarana dan Prasarana Transportasi

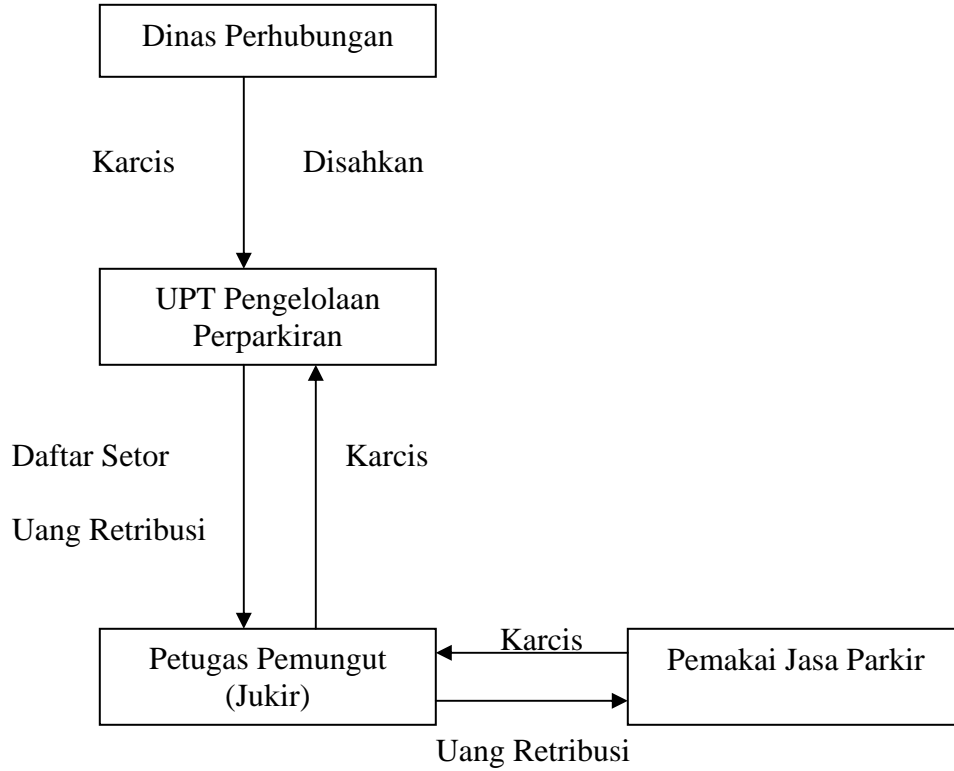
Pada tahun 2006 jumlah sarana angkutan baik umum maupun pribadi di Kota Yogyakarta adalah 275.590 unit, terdiri dari 227.653 unit sepeda motor, 31.432 unit Sedan dan Station Wagon, 2.885 unit bus dimana sejumlah 591 unit merupakan bus angkutan perkotaan dan 12.489 unit truk. Sepeda motor merupakan sarana umum yang paling dominan di Kota Yogyakarta mencapai 82,03%; sedan & station wagon diposisi yang kedua yaitu sebesar 12,07%; sedangkan bus berada diposisi terakhir yaitu sebesar 1,11%.

E. Proses Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta

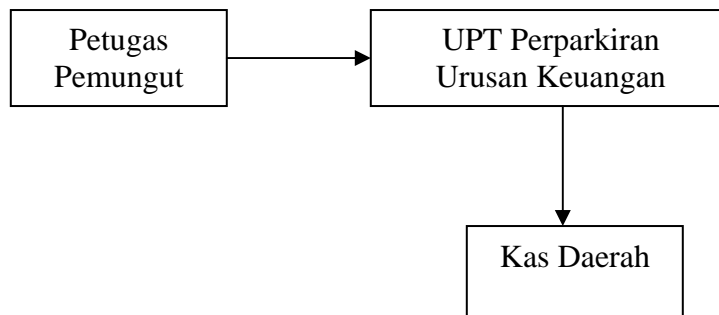
Proses pemungutan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dimulai dari disahkannya SKRD (karcis) oleh Dinas Perhubungan. Setelah itu dikirim ke Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dan para juru parkir mengambil SKRD (karcis) tersebut yang digunakan untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Setelah itu para juru parkir memungut retribusi parkir dengan memberikan karcis kepada para pemakai/pengguna tempat parkir sebagai tanda bukti. Lalu setelah juru parkir menghitung penerimaan retribusi parkir kemudian menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke UPT Pengelolaan Perparkiran bagian keuangan dan juru parkir mendapat tanda bukti setor.

Proses Pemungutan Retribusi Parkir



F. Proses Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta



Dari gambar di atas terlihat bahwa proses penerimaan berawal dari petugas pemungut parkir (Jukir) yang menyetorkan uang retribusi parkir kepada UPT Perparkiran Urusan Keuangan dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian petugas parkir mendapatkan tanda bukti setor. Kemudian UPT Perparkiran Urusan Keuangan mencatat transaksi kedalam buku kas pembantu daerah dan menyetorkan uang retribusi parkir ke Kas Daerah melalui pemegang kas atau bank yang ditunjuk.

G. Kawasan Parkir di Kota Yogyakarta

a. Kawasan parkir di Tepi Jalan Umum

1) Kawasan Khusus meliputi:

- Jl. Jendral Urip Sumoharjo
- Jl. Jendral Sudirman
- Jl. Pangeran Diponegoro
- Jl. Pangeran Mangkubumi
- Jl. Malioboro
- Jl. Jendral Ahmad Yani
- Jl. Trikora
- Jl. Panembahan Senopati
- Jl. Kyai Haji Ahmad Dahlan ruas jalan simpang empat Kantor Pos Besar sampai dengan Simpang Tiga PKU
- Jl. Reksobayan

- Jl. Pabringen
- Jl. Beskalan
- Jl. Ketandan
- Jl. Suryatmajan
- Jl. Pajeksan
- Jl. Dagen
- Jl. Perwakilan
- Jl. Sosrowijayan
- Jl. Pasar Kembang
- Jl. Abubakar Ali ruas jalan Teteg KA sisi selatan sampai dengan Gardu Listrik
- Jl. Kleringan

2) Kawasan I meliputi seluruh ruas jalan yang tidak diatur dalam Kawasan Khusus.

b. Lokasi Tempat Khusus Parkir

Tempat Khusus Parkir meliputi:

- 1) Taman Parkir Abu Bakar Ali
- 2) Taman Parkir Selatan Pasar Beringharjo
- 3) Taman Parkir Ngabean
- 4) Taman Parkir Senopati

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kotamadya Yogyakarta adalah untuk mengetahui pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir, efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir serta kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD. Data yang diperlukan adalah data realisasi dan target penerimaan retribusi parkir serta data realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Data diperoleh dari Dinas Perhubungan dan UPT Perpajakan Kota Yogyakarta Serta Dinas Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta.

1. Target Penerimaan Retribusi Parkir

Data target penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Data tersebut terlihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Target Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003 – 2006
(Rupiah)**

Tahun	Target
2003	1.425.000.000
2004	1.425.000.000
2005	1.800.000.000
2006	2.225.000.000

Sumber: Dinas Perhubungan

2. Realisasi penerimaan Retribusi Parkir

Data realisasi penerimaan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun. Data tersebut terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003 – 2006 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2003	893.949.440
2004	1.263.044.400
2005	1.913.887.700
2006	1.861.751.000

Sumber: Dinas Perhubungan

3. Biaya Pemungutan Retribusi Parkir

Data biaya pemungutan retribusi parkir dalam jangka waktu 4 tahun. Data tersebut terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Biaya pemungutan Retribusi Parkir Tahun 2003 - 2006 (Rupiah)

Tahun	Biaya
2003	342.022.000
2004	353.715.000
2005	898.319.000
2006	674.129.000

Sumber: Dinas Perhubungan

4. Realisasi Penerimaan PAD

Data realisasi penerimaan PAD dalam jangka waktu 4 tahun. Data tersebut terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2003 – 2006 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2003	68.621.564.311
2004	79.911.420.000
2005	89.196.417.000
2006	96.419.460.000

Sumber: Dinas Pendapatan

B. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan retribusi parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan retribusi parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus (Halim, 2001: 163):

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

G_x : Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir pertahun

X_t : Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir pada tahun sebelumnya

Perhitungan pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{1.263.044.400 - 893.949.440}{893.949.440} \times 100\% \\ &= 41,29 \% \end{aligned}$$

2. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{1.913.887.700 - 1.263.044.400}{1.263.044.400} \times 100\% \\ &= 51,53\% \end{aligned}$$

3. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir tahun 2006

$$= \frac{1.861.751.000 - 1.913.887.700}{1.913.887.700} \times 100\%$$

$$= (2,72\%)$$

Tabel 10. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006

Tahun	Realisasi	Pertumbuhan (%)
2003	893.949.440	-
2004	1.263.044.400	41,29
2005	1.913.887.700	51,53
2006	1.861.751.000	(2,72)
Total	5.932.632.540	90,10
Rata-rata	1.186.526.508	30,03

Sumber: data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan dari penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2004 menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 41,29%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 41,29% dari tahun 2003. Pada tahun 2005 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan menjadi sebesar 51,53%, yang artinya bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 51,53% dari tahun 2004. Kenaikan ini disebabkan kinerja Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan perparkiran yang semakin baik dan efektif. Selain itu pesatnya perkembangan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta juga mendukung tingginya penerimaan retribusi parkir. Untuk tahun 2006 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif, yaitu sebesar (2,72%). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006 pertumbuhan penerimaan

retribusi parkir mengalami penurunan sebesar (2,72%) dari tahun 2005. Terjadinya penurunan ini dikarenakan pada tahun 2006 Kota Yogyakarta mengalami bencana alam, yang secara tidak langsung mempengaruhi penerimaan dari retribusi parkir. Pada tahun ini penerimaan yang diperoleh para juru parkir mengalami penurunan, dimana penurunan penerimaan ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir. Hal ini mengakibatkan para juru parkir mengajukan keringanan pembayaran retribusi (setoran) kepada Dinas Perhubungan (dengan persetujuan Walikota).

C. Analisis Efektivitas dan Efisiensi

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir berdasarkan target yang ditetapkan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2001:263).

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan retribusi parkir digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Target Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2003

$$= \frac{893.949.440}{1.425.000.000} \times 100\%$$

$$= 62,73\%$$

b. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2004

$$= \frac{1.263.044.400}{1.425.000.000} \times 100\%$$

$$= 88,63\%$$

c. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2005

$$= \frac{1.913.887.700}{1.800.000.000} \times 100\%$$

$$= 106,32\%$$

d. Efektivitas penerimaan retribusi parkir tahun 2006

$$= \frac{1.861.751.000}{2.225.000.000} \times 100\%$$

$$= 83,67\%$$

Efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ditunjukkan dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 11. Efektivitas Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006

Tahun	Realisasi (Rupiah)	Target (Rupiah)	Efektivitas (%)
2003	893.949.440	1.425.000.000	62,73
2004	1.263.044.400	1.425.000.000	88,63
2005	1.913.887.700	1.800.000.000	106,32
2006	1.861.751.000	2.225.000.000	83,67
Rata-rata			85,34

Sumber: data diolah

Tabel di atas menunjukkan:

- 1) Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003, 2004 dan 2006 tidak dapat dikatakan efektif karena efektivitasnya kurang dari 100%, yaitu sebesar 62,73% pada tahun 2003; 88,63% pada tahun 2004; 83,67% pada tahun 2006. Meskipun demikian pada tahun 2005 efektivitas penerimaan retribusi parkir dapat melebihi 100%, yaitu sebesar 106,32%. Sehingga pada tahun 2005 dapat dikatakan penerimaan retribusi parkir efektif, yang berarti bahwa kinerja dari Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dapat dikatakan baik.
- 2) Pada tahun 2003 efektivitas penerimaan retribusi parkir sebesar 62,73%, yang berarti bahwa penerimaan retribusi parkir dapat dikatakan tidak efektif karena efektivitasnya kurang dari 100%. Pada tahun ini retribusi parkir ditargetkan sebesar Rp1.425.000.000 sementara yang terealisasi sebesar Rp893.949.440. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp531.050.560 dari target yang telah ditetapkan.

- 3) Pada tahun 2004 efektivitasnya sebesar 88,63%, yang berarti ada peningkatan sebesar 25,9% dari tahun sebelumnya. Besarnya target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2004 sebesar Rp1.425.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.263.044.400. Hal ini menunjukkan adanya penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp161.955.600 dari target yang telah ditetapkan.
- 4) Pada tahun 2005 efektivitasnya mencapai 106,32% yang berarti ada peningkatan penerimaan sebesar 17,69%. Besarnya target penerimaan retribusi parkir pada tahun 2005 sebesar Rp1.800.000.000 sedangkan realisasinya mencapai Rp1.913.887.700. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar Rp113.887.700. Dengan demikian pada tahun 2005, Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran semakin efektif dalam menjalankan tugasnya karena besarnya realisasi penerimaan retribusi yang semakin meningkat. Selain itu tercapainya target ini dikarenakan pada tahun ini pesatny jumlah kendaraan yang ada di Kota Yogyakarta. Pesatnya jumlah kendaraan dikarenakan adanya kemudahan pemberian kredit kendaraan bermotor.
- 5) Pada tahun 2006 efektivitasnya hanya mencapai 83,67% sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 106,32%. Ini berarti ada penurunan sebesar 22,65%. Pada tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penerimaan retribusi parkir sebesar Rp2.225.000.000 sementara besarnya realisasi hanya mencapai Rp1.861.751.000. Ini menunjukkan adanya

penerimaan yang tidak terealisasi sebesar Rp363.249.000. Sehingga pada tahun ini efektivitasnya dikategorikan tidak efektif karena efektivitasnya berada dibawah 100%. Faktor penyebab penerimaan retribusi parkir tidak efektif adalah karena pada tahun 2006 Kota Yogyakarta mengalami bencana alam gempa bumi, sehingga penerimaan dari retribusi parkir menurun. Dimana penurunan ini dikarenakan para juru parkir mengajukan keringanan pembayaran retribusi parkir, yang disebabkan berkurangnya jumlah kendaraan yang menggunakan area parkir.

Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir pada tahun 2003 dan tahun 2004 tidak efektif, yaitu:

- a. Penetapan target penerimaan retribusi oleh Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan resiko tidak terpungutnya retribusi parkir.
- b. Kurang disiplinnya para juru parkir yang ada, seringkali juru parkir tidak jaga sehingga menyebabkan turunnya setoran yang diberikan.
- c. Adanya itikad yang kurang baik dari pengelola parkir, dimana kurangnya kesadaran untuk menyetorkan penerimaan retribusi parkir secara penuh.

2. Analisis Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan retribusi parkir dengan realisasi penerimaan retribusi parkir yang diterima.

Rumus yang digunakan:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}} \times 100\%$$

Dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik (Halim, 2001:263-264).

Perhitungan efisiensi penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2003

$$\begin{aligned} &= \frac{342.022.000}{893.949.440} \times 100\% \\ &= 38,26\% \end{aligned}$$

- b. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{353.715.000}{1.263.044.400} \times 100\% \\ &= 28\% \end{aligned}$$

- c. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{898.319.000}{1.913.887.700} \times 100\% \\ &= 46,94\% \end{aligned}$$

- d. Efisiensi penerimaan retribusi parkir tahun 2006

$$\begin{aligned} &= \frac{674.129.000}{1.861.751.000} \times 100\% \\ &= 36,21\% \end{aligned}$$

Efisiensi penerimaan retribusi parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ditunjukkan dalam tabel 8 berikut ini:

Tabel 12. Efisiensi Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2003-2006

Tahun	Biaya Pemungutan (Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Rupiah)	Efisiensi (%)
2003	342.022.000	893.949.440	38,26
2004	353.715.000	1.263.044.400	28
2005	385.425.000	1.913.887.700	46,94
2006	674.129.000	1.861.751.000	36,21
Rata-rata			37,35

Sumber: data diolah

Tabel di atas menunjukkan:

- a. Penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai tahun 2006 sudah berjalan dengan efisien, yaitu berkisar antara 28% sampai 46,94% dengan rata-rata 37,35% atau di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perhubungan bagian UPT Pengelolaan Perparkiran dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir telah berjalan dengan baik, terbukti dengan jauh lebih kecilnya biaya pemungutan dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi parkir.
- b. Pada tahun 2003 efisiensinya sebesar 38,26%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 38,26% dari realisasi penerimaan retribusi parkir.

- c. Pada tahun 2004 efisiensinya sebesar 28%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 28% dari realisasi penerimaan retribusi parkir.
- d. Pada tahun 2005 efisiensinya sebesar 46,94%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 46,94% dari realisasi penerimaan retribusi parkir.
- e. Pada tahun 2006 efisiensinya sebesar 36,21%, ini berarti besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut retribusi parkir sebesar 36,21% dari realisasi penerimaan retribusi parkir.

D. Analisis Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan retribusi parkir dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi parkir dengan total realisasi penerimaan PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi penerimaan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2003

$$\begin{aligned}
 &= \frac{893.949.440}{68.621.564.311} \times 100\% \\
 &= 1,30\%
 \end{aligned}$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2003 sebesar 1,30%.

2. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2004

$$= \frac{1.263.044.400}{79.911.420.000} \times 100\%$$

$$= 1,58\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar 0,28% dibanding tahun sebelumnya menjadi 1,58%.

3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2005

$$= \frac{1.913.887.700}{89.196.417.000} \times 100\%$$

$$= 2,15\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,57% dibanding tahun sebelumnya menjadi 2,15%.

4. Kontribusi penerimaan retribusi parkir tahun 2006

$$= \frac{1.861.751.000}{96.419.460.000} \times 100\%$$

$$= 1,93\%$$

Kontribusi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,22% dibanding tahun sebelumnya menjadi 1,93%.

Tabel 13. Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2003	893.949.440	68.621.564.311	1,30
2004	1.263.044.400	79.911.420.000	1,58
2005	1.913.887.700	89.196.417.000	2,15
2006	1.861.751.000	96.419.460.000	1,93
Rata-rata			1,74

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang waktu tiga tahun cenderung meningkat. Peningkatan kontribusi tersebut terjadi pada tahun 2003 sebesar 1,30%; pada tahun 2004 sebesar 1,58%; pada tahun 2005 sebesar 2,15%. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,22%, yaitu dari 2,15% menjadi 1,93%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penurunan kontribusi ini disebabkan turunnya setoran yang diberikan oleh juru parkir, dimana pada tahun ini para juru parkir meminta keringanan pembayaran retribusi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 adalah positif. Besar pertumbuhannya adalah 41,29% pada tahun 2004; 51,53% pada tahun 2005. Untuk tahun 2006 pertumbuhan penerimaan retribusi parkir adalah negatif yaitu (2,72%), hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar (2,72%) dari tahun 2005.
2. a. Efektivitas penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003 sebesar 62,73%; tahun 2004 sebesar 88,63%; tahun 2005 sebesar 106,32%; tahun 2006 sebesar 83,67%. Dengan demikian penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta selama tahun 2003, 2004, dan 2006 tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2005 dapat dikatakan bahwa penerimaan retribusi parkir efektif, karena efektivitasnya berada diatas 100%.
- b. Efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta pada tahun 2003 sebesar 38,26%; tahun 2004 sebesar 28%; tahun 2005 sebesar 46,94% dan pada tahun 2006 sebesar 36,21%. Dengan demikian penerimaan retribusi

parkir di Kota Yogyakarta berjalan dengan efisien, karena efisiensi yang dicapai berada di bawah 100%.

3. Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 cenderung meningkat. Pada tahun 2003 kontribusinya sebesar 1,30%; tahun 2004 sebesar 1,58%; tahun 2005 sebesar 2,15%. Sementara itu pada tahun 2006, kontribusi tersebut turun sebesar 0,22% menjadi 1,93%.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Tidak adanya ukuran yang pasti mengenai batasan efektivitas, sehingga penulis hanya dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat Halim (2004: 134), yaitu batasan efektivitas jika mencapai minimal 1 (satu) atau 100%, semakin tinggi efektivitasnya berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.
2. Untuk menentukan efisiensi penerimaan retribusi parkir, penulis menggunakan asumsi Halim (2004: 135), yaitu batasan efisiensi kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Hal ini disebabkan tidak adanya rasio khusus untuk mengukur efisinesi yang berlaku di pemerintah Kota Yogyakarta.

C. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan khususnya UPT Pengelolaan Perparkiran untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parker untuk tahun berikutnya.
2. Dinas perhubungan diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, A. Samudra, M.Si. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Azis. 1996. Analisis Penerimaan Retribusi Parkir di Kotamadya Bandar Lampung. *www.google.com*.
- Hayani. 2001. Analisis Pemungutan Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. *www.google.com*.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maskun, Sumitro. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada DATI II dalam Otonomi Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Munawir. 1990. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberti.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 19 Tahun 2002 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 20 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 1992/1992.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soetrisno, P.H. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE-UGM.

Sugiarti. 2006. Potensi Retribusi Parkir Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri. *www.google.com*.

Suparmoko, M., MA, Dr. 1987. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.

Campiran

Pedoman Wawancara

1. Kawasan mana yang memberikan kontribusi yang tinggi dalam penerimaan retribusi parkir?
2. Berapakah anggaran retribusi parkir yang telah ditargetkan untuk periode 2003-2006?
3. Berapakah realisasi penerimaan retribusi parkir untuk periode 2003-2006?
4. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan retribusi parkir untuk periode 2003-2006?
5. Biaya-biaya apa saja yang digunakan untuk memungut retribusi parkir?
6. Apakah penerimaan retribusi parkir mengalami kenaikan/penurunan selama periode 2003-2006?
7. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir di kota Yogyakarta tidak dapat mencapai target?
8. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir selama periode 2003-2006?
9. Berapa jumlah petugas pemungut parkir di Kota Yogyakarta?
10. Bagaimana alur pelaksanaan pemungutan retribusi parkir?
11. Bagaimana alur penerimaan retribusi parkir?

Tabel 1
Biaya Pemungutan Retribusi Parkir Kota Yogyakarta
Tahun 2003-2006 (Rupiah)

Tahun	Biaya Pemungutan
2003	342.022.000
2004	353.715.000
2005	898.319.000
2006	674.129.000

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Kota Yogyakarta
Tahun 2003-2006 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2003	1.425.000.000	893.949.440
2004	1.425.000.000	1.263.044.400
2005	1.800.000.000	1.913.887.700
2006	2.225.000.000	1.861.751.000

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 3
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Kota Yogyakarta
Tahun 2003-2006 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2003	68.621.564.311
2004	79.911.420.000
2005	89.196.417.000
2006	96.419.460.000

Sumber: Dinas Pendapatan



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5606

Membaca Surat : Dekan F. Ekonomi USD Nomor : 31/Kaprodi Akt/173/IX/2007
Tanggal : 5 Oktober 2007 Perihal : Ijiri Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : P. HERU PRASETYO No. MHSW : 032114029
Alamat Instansi : Jl. Mrican Yogyakarta
Judul : ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 6 - 10 - 2007 s/d 6 - 01 - 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q. Ka. Dinas Perijinan;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Dekan F. Ekonomi - USD;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 6 - 10 - 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U B - KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 532682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1952
8035/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5808 Tanggal : 06/10/2007

Mengingat :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/L.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada :

Nama : P. HERU PRASETYO NO MHS / NIM : 032114029
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Yogyakarta
Penanggungjawab : A. Diksa Kuntara, SE, MFA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 06/10/2007 Sampai 06/01/2008
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


P. HERU PRASETYO

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
4. Ybs.





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Magelang No. 41 Telp. (0274). 561787
YOGYAKARTA

Kode Pos: 55242

Surat Pengantar
Nomor : 070/2400

Kepada
Yth.

Ka.UPT Perparkiran
Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Berdasarkan surat ijin penelitian nomor : 070/1952_ tanggal 22 Oktober 2007 dari Dinas
8035/34

Perizinan Kota Yogyakarta atas nama P.HERU PRASETYO Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, pada tanggal 6 Oktober 2007 s/d 6 Januari 2007 akan
melakukan penelitian dengan judul " ANALISIS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)
" di UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Untuk itu mohon dapat dibantu,
atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Oktober 2007

An. Kepala Dinas
Ka. Nag. Tata Usaha



EDDY NUGROHO

NIP. 490 017 186